



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani bangsa**

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA



kab-purwakarta.kpu.go.id



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
I. BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Dasar Hukum.....	4
II. BAB II HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS.....	6
A. Hasil Pelaksanaan.....	6
1. Komponen Pengungkit.....	6
a. Manajemen Perubahan.....	6
b. Penataan Tata Laksana.....	8
c. Penataan Sistem Manajemen SDM.....	10
d. Penguatan Akuntabilitas.....	14
e. Penguatan Pengawasan.....	16
f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.....	19
2. Komponen Hasil.....	22
B. Kendala/Hambatan dan Upaya untuk Mengatasinya.....	23
III. BAB III PENUTUP.....	25
A. Kesimpulan.....	25
B. Rencana Tindak Lanjut.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. BA Pleno Pembentukan Tim Zona Integritas.....	6
Gambar 2. SK Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas.....	7
Gambar 3. Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas.....	8
Gambar 4. Pemberian Teladan oleh Pimpinan.....	8
Gambar 5. Daftar Inventarisasi SOP.....	9
Gambar 6. Dashboard SIMPEG KPU.....	9
Gambar 7. Tangkapan Layar PPID KPU Purwakarta.....	10
Gambar 8. SK Peta Jabatan di Sekretariat KPU.....	11
Gambar 9. Surat Perintah Sekretaris KPU Kab. Purwakarta.....	11
Gambar 10. Rekapitulasi Kompetensi Pegawai.....	12
Gambar 11. Indikator Kinerja Utama KPU Kab. Purwakarta.....	12
Gambar 12. Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman.....	13
Gambar 13. Rekapitulasi Data Pegawai di MyASN.....	14
Gambar 14. Keterlibatan Pimpinan dalam Evaluasi Kinerja.....	15
Gambar 15. Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kab. Purwakarta.....	15
Gambar 16. Pelaporan Gratifikasi Melalui Website Resmi.....	16
Gambar 17. Laporan Penyelenggaraan SPIP.....	17
Gambar 18. Mekanisme Pengaduan Masyarakat Melalui Website.....	18
Gambar 19. Formulir WBS KPU Kab. Purwakarta.....	18
Gambar 20. Regulasi Penanganan Benturan Kepentingan.....	19
Gambar 21. PKPU No. 22 Tahun 2023.....	20
Gambar 22. Knowledge Sharing PPID.....	20
Gambar 23. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Online.....	21
Gambar 24. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.....	21
Gambar 25. Pelayanan Menggunakan Teknologi Informasi.....	22
Gambar 26. Hasil Evaluasi SAKIP KPU Kab. Purwakarta.....	22
Gambar 27. Laporan Pelaksanaan SKM KPU Kab. Purwakarta.....	23

**LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TAHUN 2025
PADA KPU KABUPATEN PURWAKARTA**

I. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta secara konsisten melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Zona Integritas ini berlandaskan pada Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1766 Tahun 2025 serta Surat Keputusan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 3734 Tahun 2025, yang menjadi pedoman normatif sekaligus arah strategis dalam penguatan integritas kelembagaan. Keberadaan Zona Integritas memiliki peran krusial sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan bagi KPU Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dilaksanakan secara profesional, mandiri, dan berintegritas tinggi.

Lebih lanjut, pembangunan Zona Integritas merupakan wujud komitmen nyata KPU Kabupaten Purwakarta dalam mendukung terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk menjamin pelaksanaan yang terarah dan terkoordinasi, dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas melalui Keputusan Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta. Tim ini memiliki tugas strategis, salah satunya menyusun dan melaporkan hasil pembangunan Zona Integritas secara berkala.

Kegiatan pelaporan tersebut bertujuan memperoleh gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai capaian, perkembangan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Informasi

yang diperoleh melalui laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi. Dengan demikian, pelaporan pembangunan Zona Integritas tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat kendali dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Purwakarta.

Adapun ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi mencakup pemantauan atas seluruh area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Seluruh area tersebut menjadi indikator utama dalam menilai konsistensi dan efektivitas pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta.

B. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja ini disusun sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta beserta para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dokumen ini juga menjadi pedoman dalam upaya mewujudkan wilayah kerja yang bersih dari praktik korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sesuai dengan tagline *"KPU Melayani"*. Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja ini adalah:

1. Mewujudkan keseragaman pemahaman, sikap, dan tindakan seluruh jajaran dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta;
2. Menjadi pedoman pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusulan Unit/ Satuan Kerja menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025.

II. BAB II HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. Hasil Pelaksanaan

1. Komponen Pengungkit

a. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan merupakan pondasi awal dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta. Komponen ini diarahkan untuk mendorong perubahan sistematis dan berkelanjutan terhadap pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur, sehingga tercipta birokrasi yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

i. Penyusunan Tim Kerja

KPU Kabupaten Purwakarta telah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas melalui mekanisme rapat pleno dan penetapan resmi pimpinan. Tim kerja dibentuk secara representatif dengan melibatkan unsur pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta staf pelaksana. Pembentukan tim ini bertujuan untuk memastikan adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, serta menumbuhkan rasa kepemilikan dan komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.



Gambar 1. BA Pleno Pembentukan Tim Zona Integritas

ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas

Sebagai pedoman pelaksanaan, KPU Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana Pembangunan Zona Integritas yang memuat tujuan, sasaran, tahapan kegiatan, indikator

keberhasilan, serta jadwal pelaksanaan. Rencana ini disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan kebutuhan organisasi, serta selaras dengan kebijakan nasional dan pedoman pembangunan WBK/WBBM. Dokumen rencana tersebut menjadi acuan utama bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program reformasi birokrasi.



Gambar 2. SK Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas

iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, KPU Kabupaten Purwakarta secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui rapat evaluasi internal, pelaporan progres kegiatan, serta penilaian capaian indikator kinerja. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan.



Gambar 3. Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

iv. **Perubahan pola pikir dan budaya kerja**

Upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan melalui sosialisasi nilai-nilai integritas, penandatanganan pakta integritas, pemberian teladan oleh pimpinan, serta pembiasaan perilaku kerja yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Seluruh pegawai didorong untuk menjunjung tinggi nilai profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.



Gambar 4. Pemberian Teladan oleh Pimpinan

b. **Penataan Tata Laksana**

Penataan tata laksana difokuskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi proses kerja melalui penyempurnaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan keterbukaan informasi kepada publik.

i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

KPU Kabupaten Purwakarta telah menyusun dan menetapkan SOP untuk seluruh kegiatan utama dan pendukung. SOP disusun secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami, serta ditinjau secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan organisasi. Implementasi SOP bertujuan untuk menjamin konsistensi layanan, kepastian prosedur, dan pencegahan penyimpangan.

No. Inven. SOP	Nama SOP	Bagian/Bagian	Status	Uraian	Tanggal Disyusunkan	Kemungkinan
1	101	101	101	101	101	101
2	102	102	102	102	102	102
3	103	103	103	103	103	103
4	104	104	104	104	104	104
5	105	105	105	105	105	105
6	106	106	106	106	106	106
7	107	107	107	107	107	107
8	108	108	108	108	108	108
9	109	109	109	109	109	109
10	110	110	110	110	110	110
11	111	111	111	111	111	111
12	112	112	112	112	112	112
13	113	113	113	113	113	113
14	114	114	114	114	114	114
15	115	115	115	115	115	115
16	116	116	116	116	116	116
17	117	117	117	117	117	117
18	118	118	118	118	118	118
19	119	119	119	119	119	119
20	120	120	120	120	120	120
21	121	121	121	121	121	121
22	122	122	122	122	122	122
23	123	123	123	123	123	123
24	124	124	124	124	124	124
25	125	125	125	125	125	125
26	126	126	126	126	126	126
27	127	127	127	127	127	127

Gambar 5. Daftar Inventarisasi SOP

ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam mendukung reformasi birokrasi, KPU Kabupaten Purwakarta menerapkan SPBE melalui pemanfaatan berbagai aplikasi dan sistem informasi, baik yang bersifat nasional maupun internal. Penerapan SPBE diharapkan dapat meningkatkan kecepatan layanan, akurasi data, serta transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi.

The screenshot shows the SIMPEG KPU Dashboard with the following components:

- Header:** SIMPEG KPU KABUPATEN PURWAKARTA
- Dashboard Metrics:**
 - 16 (with icon)
 - 10 (with icon)
 - 2 (with icon)
 - 28 (with icon)
- Table 1: Data with Filter**

No	Uraian	Status	Jumlah
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
- Table 2: Data with Filter**

No	Uraian	Status	Jumlah
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Gambar 6. Dashboard SIMPEG KPU

iii. Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi, KPU Kabupaten Purwakarta secara aktif menyediakan dan menyampaikan informasi publik melalui website resmi, media sosial, dan layanan informasi langsung. Pengelolaan keterbukaan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.



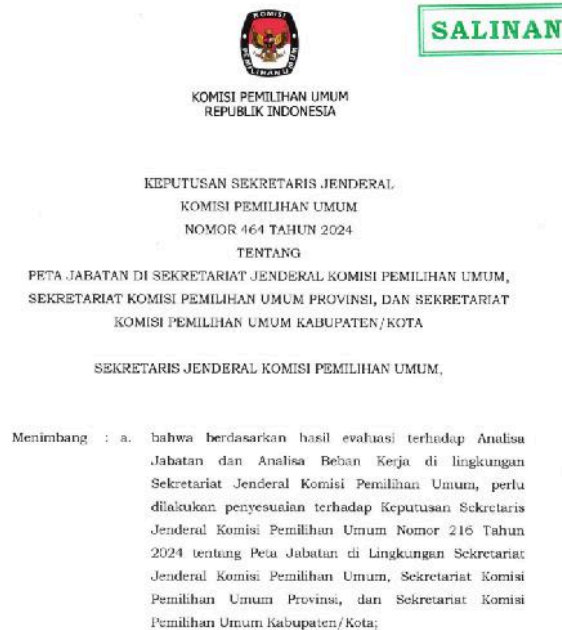
Gambar 7. Tangkapan Layar PPID KPU Purwakarta

c. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen sumber daya manusia diarahkan untuk mewujudkan aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

Perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi, sehingga penempatan pegawai dapat dilakukan secara tepat dan proporsional.



Gambar 8. SK Peta Jabatan di Sekretariat KPU

ii. Pola Mutasi Internal

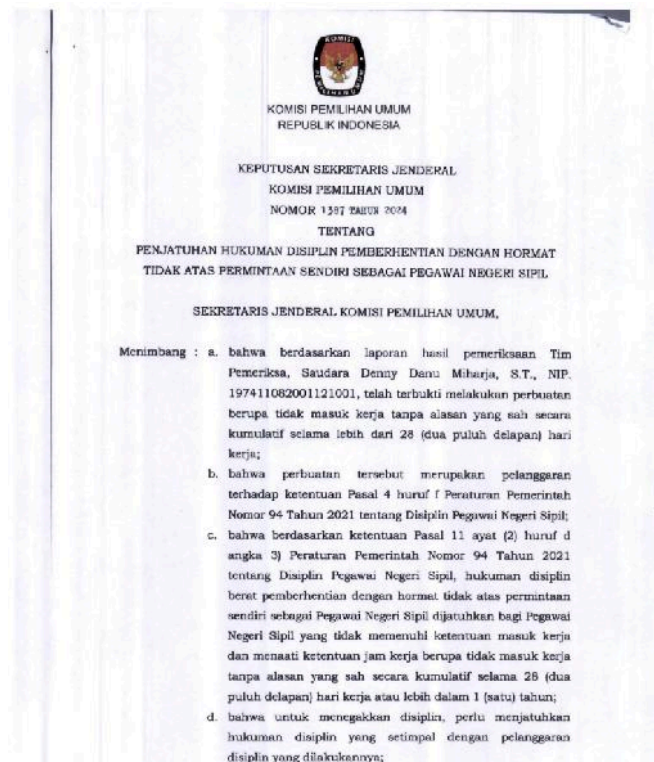
KPU Kabupaten Purwakarta menerapkan pola mutasi internal secara objektif dan transparan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi pegawai serta pencegahan praktik tidak sehat dalam organisasi.



Gambar 9. Surat Perintah Sekretaris KPU Kab. Purwakarta

v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Penegakan disiplin dan kode etik dilakukan secara konsisten dan adil. Setiap pelanggaran ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga integritas organisasi.



Gambar 12. Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman

vi. Sistem Informasi Kepegawaian

Pengelolaan data kepegawaian dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi untuk menjamin akurasi, kemutakhiran, dan kemudahan akses data.

ID	NAMA	IPK	PROSES	GARANSI	REPUTASI	LOKASI	PROSES	REPUTASI	LOKASI
16	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Indah	0504010101010101	IPK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gambar 13. Rekapitulasi Data Pegawai di MyASN

d. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas di KPU Kabupaten Purwakarta diarahkan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dilaksanakan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dipandang sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi yang baik, yang tidak hanya menekankan pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pencapaian hasil dan dampak kinerja yang nyata. Melalui penguatan akuntabilitas, KPU Kabupaten Purwakarta berupaya membangun sistem manajemen kinerja yang selaras antara perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja.

i. Keterlibatan Pimpinan

Pimpinan KPU Kabupaten Purwakarta terlibat secara aktif dalam seluruh siklus manajemen kinerja, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja. Keterlibatan pimpinan diwujudkan melalui penetapan arah kebijakan, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemberian arahan dan evaluasi secara berkala. Peran aktif pimpinan juga tercermin dalam keteladanan penerapan prinsip akuntabilitas dan integritas, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.



Gambar 14. Keterlibatan Pimpinan dalam Evaluasi Kinerja

ii. **Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja**

Pengelolaan akuntabilitas kinerja di KPU Kabupaten Purwakarta dilaksanakan melalui penyusunan dokumen perencanaan kinerja, penetapan indikator kinerja yang terukur, serta penyusunan laporan kinerja secara periodik dan tepat waktu. Seluruh proses tersebut dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis organisasi. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.



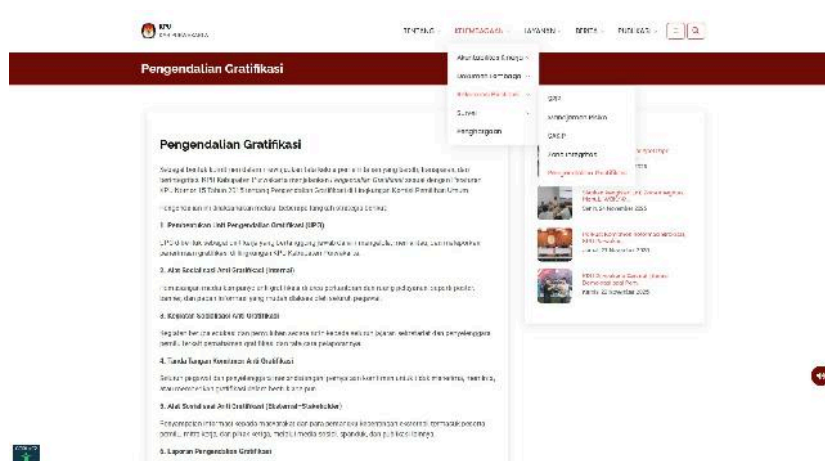
Gambar 15. Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kab. Purwakarta

e. Penguatan Pengawasan

Penguatan Pengawasan merupakan salah satu upaya strategis KPU Kabupaten Purwakarta dalam mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewujudkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan berintegritas. Pengawasan dilaksanakan secara terpadu melalui mekanisme pencegahan, pengendalian, dan penanganan atas potensi pelanggaran, sehingga risiko terjadinya praktik tidak sehat dapat diminimalkan sejak dini.

i. Pengendalian Gratifikasi

KPU Kabupaten Purwakarta melaksanakan pengendalian gratifikasi melalui kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai, penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi, serta penyediaan mekanisme pelaporan gratifikasi yang mudah diakses. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai terhadap larangan penerimaan gratifikasi, sekaligus membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas.



Gambar 16. Pelaporan Gratifikasi Melalui Website Resmi

ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penerapan SPIP dilakukan sebagai instrumen pengendalian risiko dalam seluruh proses kegiatan organisasi. KPU Kabupaten Purwakarta menerapkan SPIP secara terintegrasi, mulai dari identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, hingga penetapan langkah pengendalian yang diperlukan.

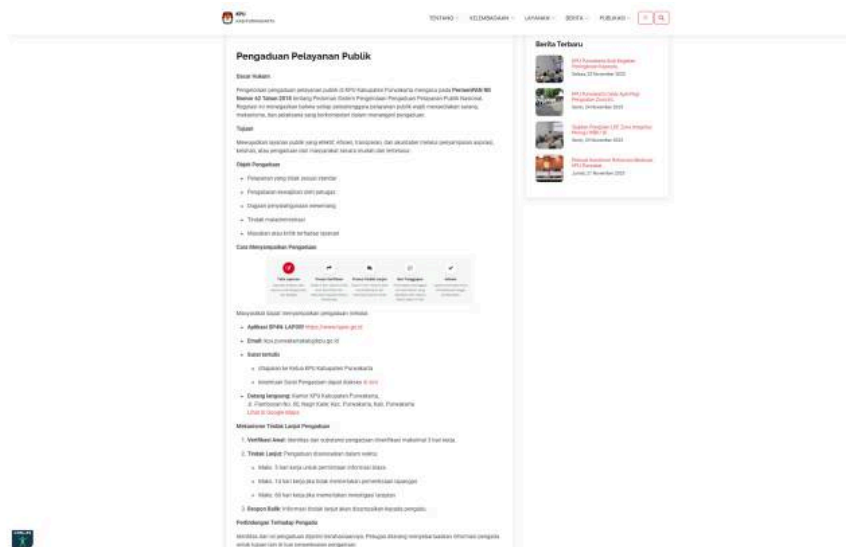
Dengan penerapan SPIP, diharapkan seluruh kegiatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 17. Laporan Penyelenggaraan SPIP

iii. Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan responsif melalui berbagai kanal pengaduan yang tersedia. Setiap pengaduan yang diterima dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengaduan masyarakat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta.



Gambar 18. Mekanisme Pengaduan Masyarakat Melalui Website

iv. *Whistle-Blowing System (WBS)*

KPU Kabupaten Purwakarta menyediakan *Whistleblowing System* sebagai sarana pelaporan pelanggaran yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor. WBS dimanfaatkan untuk mendorong partisipasi aktif pegawai dan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran, sekaligus sebagai bentuk komitmen organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan berintegritas.

Gambar 19. Formulir WBS KPU Kab. Purwakarta

v. *Penanganan Benturan Kepentingan*

Pencegahan dan penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui sosialisasi kebijakan benturan kepentingan

serta penetapan komitmen integritas bagi seluruh pegawai. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dilaksanakan secara objektif, profesional, dan bebas dari kepentingan pribadi atau golongan tertentu.



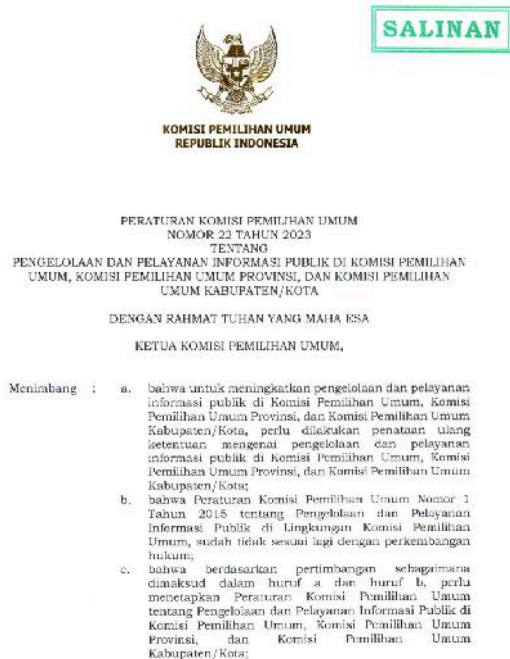
Gambar 20. Regulasi Penanganan Benturan Kepentingan

f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komitmen KPU Kabupaten Purwakarta untuk menghadirkan layanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pelayanan publik dipandang sebagai wajah organisasi, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dilakukan secara berkelanjutan dan terukur.

i. Standar Pelayanan

KPU Kabupaten Purwakarta telah menetapkan standar pelayanan sebagai pedoman dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Standar pelayanan tersebut disusun secara jelas dan disosialisasikan kepada pengguna layanan untuk menjamin kepastian prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan.



Gambar 21. PKPU No. 22 Tahun 2023

ii. Budaya Pelayanan Prima

Budaya pelayanan prima ditanamkan kepada seluruh pegawai melalui pembinaan, sosialisasi, serta keteladanan pimpinan. Seluruh pegawai didorong untuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

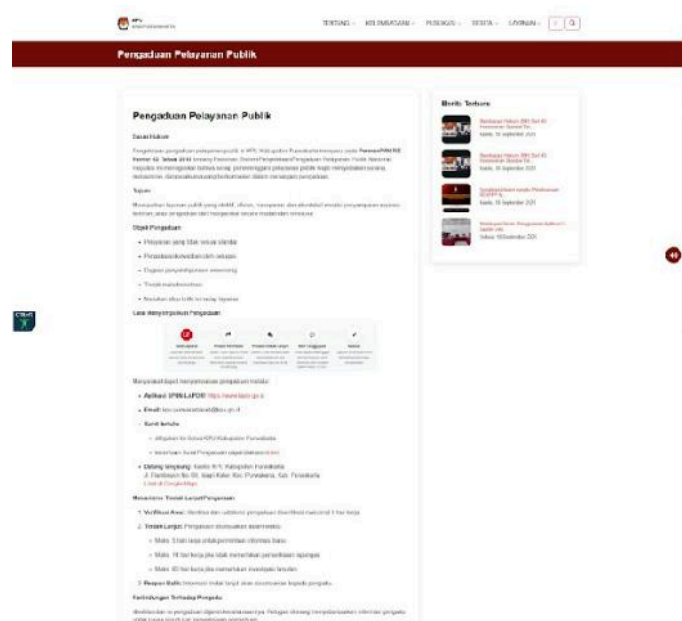


Gambar 22. Knowledge Sharing PPID

iii. Pengelolaan Pengaduan

KPU Kabupaten Purwakarta telah menyiapkan dan menyediakan mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan yang jelas, terstruktur, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Mekanisme tersebut disosialisasikan melalui berbagai media sebagai bentuk kesiapan organisasi dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan apabila diperlukan.



Gambar 23. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Online

iv. **Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan**

KPU Kabupaten Purwakarta secara berkala melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan. Hasil survei digunakan sebagai dasar dalam penyusunan langkah perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.



Gambar 24. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

v. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Melalui penggunaan sistem informasi dan media digital, KPU Kabupaten Purwakarta berupaya memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

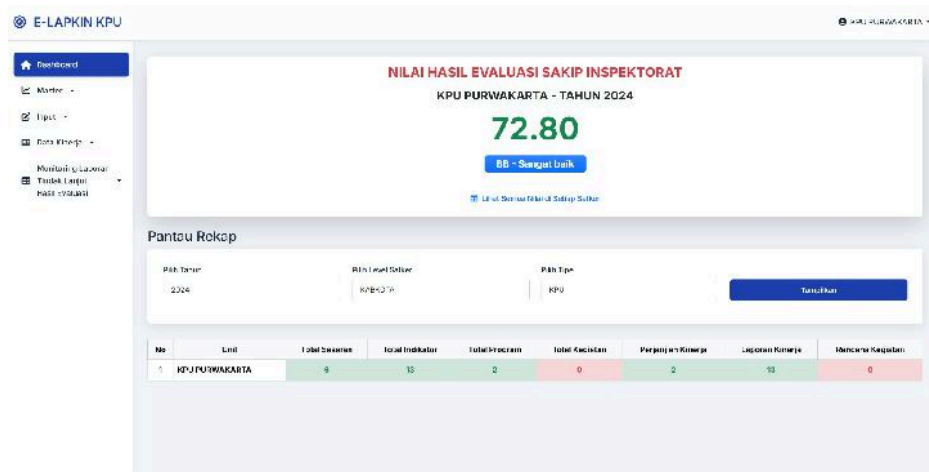


Gambar 25. Pelayanan Menggunakan Teknologi Informasi

2. Komponen Hasil

i. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Purwakarta diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang bersih dari praktik KKN, memiliki sistem kerja yang transparan, serta akuntabel dalam pengelolaan sumber daya dan kinerja.



Gambar 26. Hasil Evaluasi SAKIP KPU Kab. Purwakarta

ii. Pelayanan Publik yang Prima

Melalui pembangunan Zona Integritas, KPU Kabupaten Purwakarta berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, ramah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu semakin meningkat.



Gambar 27. Laporan Pelaksanaan SKM KPU Kab. Purwakarta

B. Kendala/Hambatan dan Upaya untuk Mengatasinya

Dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi oleh pejabat dan pegawai. Pertama, perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja belum berjalan secara optimal. Hal ini terjadi karena pemahaman yang belum merata serta perbedaan cara pandang terhadap upaya perubahan, sehingga beberapa pegawai masih menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip Zona Integritas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif, disertai pembinaan secara berkelanjutan agar seluruh jajaran dapat memahami tujuan dan pentingnya perubahan budaya kerja dalam pembangunan Zona Integritas.

Kendala kedua berkaitan dengan dukungan dan koordinasi antar lembaga. Koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota belum optimal, terutama terkait pendistribusian arahan dan informasi mengenai pembangunan Zona Integritas, baik dari segi waktu maupun konten informasi. Kondisi ini berimplikasi pada kurang efektifnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat mekanisme komunikasi, misalnya melalui forum rutin, penyelarasan jadwal kegiatan, serta pemanfaatan platform digital untuk mempercepat penyampaian arahan dan memastikan setiap satuan kerja mendapatkan informasi secara tepat waktu.

Kendala ketiga muncul dari pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal dalam pengembangan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja. Sistem yang ada belum sepenuhnya mendukung monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas secara akurat dan efisien. Untuk itu, pengembangan sistem digital yang terintegrasi perlu ditingkatkan, termasuk pelatihan bagi pegawai agar mampu menggunakan teknologi informasi secara optimal dalam pencatatan, pelaporan, dan analisis kinerja Zona Integritas.

Kendala terakhir adalah kurangnya sosialisasi dan pembinaan terkait pembangunan Zona Integritas dan evaluasinya. Akibatnya, pembangunan Zona Integritas seringkali dipersepsikan hanya sebagai pemenuhan administrasi dan penyusunan dokumen laporan, bukan sebagai upaya nyata untuk peningkatan kualitas layanan dan integritas. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan sosialisasi melalui seminar, workshop, dan media komunikasi internal, serta pembinaan berkala yang menekankan implementasi Zona Integritas dalam aktivitas kerja sehari-hari sehingga setiap pegawai memahami nilai strategis dari Zona Integritas.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kendala-kendala yang ada dapat diminimalisir dan pembangunan Zona Integritas dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

III. BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 telah dilaksanakan secara konsisten pada seluruh area perubahan dan menunjukkan capaian positif dalam penguatan tata kelola organisasi. Pelaksanaan program Zona Integritas berdampak pada meningkatnya akuntabilitas kinerja, penguatan sistem pengawasan internal, serta terbentuknya budaya kerja yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas. Keterlibatan aktif pimpinan, penerapan mekanisme pengendalian dan pengawasan, serta penyediaan standar pelayanan yang jelas telah mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih tertib dan akuntabel. Tidak adanya pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2025 mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah berjalan sesuai standar dan memenuhi kebutuhan pengguna layanan. Secara keseluruhan, pembangunan Zona Integritas memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Purwakarta sebagai penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas.

B. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan peningkatan capaian pembangunan Zona Integritas, KPU Kabupaten Purwakarta menetapkan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- i. Memperkuat internalisasi nilai integritas dan budaya kerja, untuk memastikan perubahan perilaku aparatur berjalan konsisten dan berkelanjutan.
- ii. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, melalui pemantauan dan evaluasi kinerja yang lebih terukur dan berbasis hasil.
- iii. Mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian internal, guna menjaga kepatuhan dan meminimalkan potensi penyimpangan.
- iv. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan menjaga kepatuhan terhadap standar pelayanan dan pemanfaatan masukan masyarakat.
- v. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, sebagai pendukung efektivitas kinerja, pengawasan, dan pelayanan publik.
- vi. Melalui rencana tindak lanjut tersebut, KPU Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.

Purwakarta, 29 Desember 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta



Dian Hadiana

LAMPIRAN

				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
A. PENGUNGKIT				60.00					
I. PEMENUHAN				30.00					
1. MANAJEMEN PERUBAHAN				4.00					
i. Penyusunan Tim Kerja				0.50					
			a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas		Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.	Ya/Tidak	Ya	Tim Pembangunan Zona Integritas telah dibentuk di KPU Kabupaten Purwakarta.	SK KPU Kabupaten Purwakarta No. 19 Tahun 2025 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas https://drive.google.com/drive/folders/1JufEZtGgCoVus498e2riwBrfcYYTwDKj?usp=drive_link
			b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas		a. Jika dengan prosedur/mechanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja c. Jika tidak di seleksi.	A/B/C	B	Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas (musyawarah melalui rapat pleno) dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja.	1. Berita Acara KPU Kab. Purwakarta No. 38 Tahun 2025 2. Dokumentasi Rapat Pleno KPU Kab. Purwakarta tanggal 20 Oktober 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1wLCJgYYrel_uDYc4HebMo-LLbMHtgw-5?usp=drive_link
ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas				1.00					
			a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.	Ya/Tidak	Ya	KPU Kabupaten Purwakarta telah memiliki Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas	1. Berita Acara Pleno KPU Kab. Purwakarta terkait Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas KPU Kab. Purwakarta. 2. SK penetapan Rencana Kerja Zona Integritas KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1kF5sCv1BYslB4FwBodBn67z52gg0VElI?usp=drive_link
			b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM		a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuanpembangunan WBK/WBBM b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	A/B/C	B	Sebagian target-target prioritas di KPU Kab. Purwakarta telah relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	1. Dokumen Rencana Kerja Zona Integritas KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1mjZfEwYY4xSNPKKTAJhdJXsl6f40d3Wo?usp=drive_link
			c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM		a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan	A/B/C	A	KPU Kabupaten Purwakarta telah melakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala.	1. Poster Zona Integritas di lingkungan KPU Kab. Purwakarta 2. Standing banner Zona Integritas di lingkungan KPU Kab. Purwakarta 3. Tangkapan layar website KPU Kab. Purwakarta 4. Tangkapan layar website JDIH KPU Kab. Purwakarta 5. Tangkapan layar media sosial JDIH dan KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1YHUUMHHkqLOVPAQ4M4NOrk_vKacFEw0d?usp=drive_link
iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM				1.00					

LAMPIRAN

Bobot					Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit			
				a.	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana			a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana	A/B/C/D	B	Sebagian besar kegiatan pembangunan di KPU Kab. Purwakarta telah dilaksanakan sesuai dengan rencana	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1k_Q57NM0vtw3IO21q4kGpx5dIMNzEVbA?usp=drive_link
				b.	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas			a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas	A/B/C/D	B	Monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas di KPU Kab. Purwakarta melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala	1. Berita Acara Pleno tentang Pembangunan Zona Integritas di KPU Kab. Purwakarta 2. Dokumentasi Rapat Pleno tentang Pembangunan Zona Integritas di KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1lDdO8uKtx5Yq7gQtts0BI6OaWnKoAIXG?usp=drive_link
				c.	Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti			a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	B	Sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti	<u>1. Berita Acara Pleno tentang Pembangunan Zona Integritas di KPU Kab. Purwakarta</u> <u>2. Dokumentasi Rapat Pleno tentang Pembangunan Zona Integritas di KPU Kab. Purwakarta</u> https://drive.google.com/drive/folders/1GOeXF1v68PmacikBZRQyCrC3Gqm_R2cu?usp=drive_link
			iv. Perubahan pola pikir dan budaya kerja			1.50						
				a.	Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM			ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.	Ya/Tidak	Ya	Pimpinan Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta telah menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.	1. Dokumentasi kegiatan FGD Tata Kelola Keuangan Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan KPU Pasca Pemilu dan Pilkada Serentak di Lingkungan KPU. 2. Penghargaan kepada KPU Kab. Purwakarta dari satker atau instansi lain https://drive.google.com/drive/folders/1OB9Pxj7-mW-bUj1Rx_Ln0ie6w49a-lo8?usp=drive_link
				b.	Sudah ditetapkan agen perubahan			a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya c. Jika belum terdapat agen perubahan	A/B/C	B	Agen perubahan KPU Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya.	SK KPU Kab. Purwakarta tentang Agen Perubahan https://drive.google.com/drive/folders/1_a-tihzJwNBQ9GDH0vv4C8hmZ03PFDII?usp=drive_link

LAMPIRAN

Bobot					Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
			c.	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi		a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir	A/B/C	A	Pimpinan Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta telah melakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan. https://drive.google.com/drive/folders/1VVUGf5XoNfObJJQtHRD3X_i6r3hq5747?usp=drive_link
			d.	Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	A/B/C/D	A	Semua Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan https://drive.google.com/drive/folders/1oRfVhvTFUxMfwF8brmecRbUnSwuYs0F9?usp=drive_link
			2. PENATAAN TATALAKSANA		3.50				
			i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama		1.00				
			a.	SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi		a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis	A/B/C/D		Telah dilakukan Rapat Pembahasan SOP dan Inventarisir SOP di Kabupaten Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1rhZJMgyf2shsN8hdKF03TOCibp8k1KzY?usp=drive_link
			b.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi	A/B/C/D/E	C	KPU Kab. Purwakarta telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi https://drive.google.com/drive/folders/1YFvcMR15fgVHSgC5ZGRmfobreOk1XGX-?usp=drive_link

LAMPIRAN

					Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
				c.		Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi			Sebagian besar SOP utama di KPU Kab. Purwakarta telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti	Dokumen laporan pelaksanaan SOP di KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1VLN5iQKWk7DVOIgWIHyS43eIZO4Sgmle?usp=drive_link
				ii.	2.00	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				
				a.		Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi			KPU memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi	Tangkapan layar E-LAPKIN KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1PX1fPOM_fAiEPOCdBY6S0jNx1rBar9i2?usp=drive_link
				b.		Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi			KPU Kabupaten Purwakarta memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat	Tangkapan layar aplikasis SIMPEG, MyAsn, dan SIMPEL https://drive.google.com/drive/folders/16D-xWqSOObOoGuCaPy7T-vhhIVolJcpv?usp=drive_link
				c.		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi			KPU Kab. Purwakarta memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi	Tangkapan layar E-PPID, Website, Whatsapp, dan Google Form layanan KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1L8XW4bbYc0YtAwELzsxdIjAI5aIqFHIIs?usp=drive_link

LAMPIRAN

				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
			d		a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	A/B/C	B	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala	1. Penilaian pengguna layanan 2. QR Code penilaian pengguna layanan 3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan https://drive.google.com/drive/folders/1QknBqzxWiwnnysFvAZBU1SXTE3NHRJRH?usp=drive_link
			iii.	Keterbukaan Informasi Publik	0.50				
			a.	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik	A/B/C	A	Sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap	1. SOP dan Infografis pelayanan KPU Kab. Purwakarta 2. Buku Register 3. Tangkapan layar pelayanan melalui media sosial dan website https://drive.google.com/drive/folders/1hM-EHOUC8onlFDkM2foqcRa8UrmcLBBk?usp=drive_link
			b.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan	A/B/C	B	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti	1. Dokumentasi kegiatan terkait informasi publik dari KPU RI 2. Knowledge Sharing terkait keterbukaan informasi publik dengan masing-masing Ketua Divisi di KPU Kab. Purwakarta 3. Laporan pelayanan informasi publik 2023 dan 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1_6ZZuxAP4Rcb39rSJbZHa-QTNY8OoDVG?usp=drive_link
			3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00				
			i.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0.25				
			a.	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.	Ya/Tidak	Ya	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh KPU Kabupaten Purwakarta mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	1. Surat Perintah Sekretaris KPU Kab. Purwakarta tentang Penempatan Pegawai 2. SK Sekjen No. 464/2024 tentang Peta Jabatan https://drive.google.com/drive/folders/1yM8Z3QS3ofxA8tbECzHyw-VSng8vL2IM?usp=drive_link

LAMPIRAN

				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
			b.		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	A/B/C/D	A	semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	1. SK CPNS 2. SK Jabatan Pelaksana 3. SK PPPK https://drive.google.com/drive/folders/1XU5Ook76K9raFWyGlgbQclwrnylgLYyE?usp=drive_link
			c.		Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.	Ya/Tidak	Ya	sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.	Rekapitulasi Laporan Kinerja Harian dan Sasaran Kinerja Pegawai KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/12noSaWlZrUrjiXw9Ghuao8xe-2dXdw9?usp=drive_link
			ii.	0.50	Pola Mutasi Internal				
			a.		Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.	Ya/Tidak	Ya	dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.	Surat Perintah Sekretaris KPU Kab. Purwakarta tentang penempatan pegawai https://drive.google.com/drive/folders/1sdMQ0b1xFtfm71WW3Fvdp9U1994SU1Wh?usp=drive_link
			b.		Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang ditetapkan a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi	A/B/C/D/E	A	semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan KPU RI dan juga KPU Kab Purwakarta memberikan pertimbangan terkait hal ini	1. Surat Perintah Sekretaris KPU Kab. Purwakarta tentang penempatan pegawai 2. SK KPU Provinsi Jabar tentang Jabatan Pelaksana 3. Surat usulan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana https://drive.google.com/drive/folders/1XkicjfwJIUePT9XoxsgY56KnqE7wfnAC?usp=drive_link

LAMPIRAN

				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
			c.		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja		Ya	sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.	1. Tangkapan Layar Peta Jabatan 2. Dokumentasi Rapat Sekretariat 3. Notulensi rapat terkait peta jabatan https://drive.google.com/drive/folders/1bQLFY0ssqgWFoCBfTPiNRTbx7yoEgUm0?usp=drive_link
			iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1.25					
			a.		Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi		Ya	sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi.	1. Tangkapan layar SIMPEL 2. Surat Perintah Sekretaris 3. Inventarisasi pelatihan kompetensi pegawai 4. Orientasi PPPK berbasis MOOC https://drive.google.com/drive/folders/1NZzI--30JlKekRhvthHXXT2frwjGOla?usp=drive_link
			b.		Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai		A/B/C/D	semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	1. Dokumentasi rapat sekretariat tentang peta jabatan 2. Sharing Knowledge dengan Anggota KPU 3. Sosialisasi perpajakan oleh KPP Purwakarta 4. Rapat Koordinasi pelayanan kepegawaian https://drive.google.com/drive/folders/1Vb5amVy-XWWldk0Ru8YEQkyKZ_OUFz0O?usp=drive_link
			c.		Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan		A/B/C/D	Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%	Daftar Kompetensi Pegawai di Sekretariat KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1gSwP0ofTb4nRZYW-YIRys4C9Z4Bdnj0b?usp=drive_link

LAMPIRAN

					Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
				d.		Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya			Seluruh pegawai di KPU Kabupaten Purwakarta telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Daftar Kompetensi Pegawai di Sekretariat KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1b61adjUbcexOYp0FndBcqzN_bOPijqe?usp=drive_link
				e.		Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, <i>in-house training</i> , coaching, atau mentoring)			KPU Kabupaten Purwakarta melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai	Daftar Kompetensi Pegawai di Sekretariat KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1JDLmfCKIUBNJMFp2mjaHIC05cGQE0Iz?usp=drive_link
				f.		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja			Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala	1. Laporan atau SK tentang Daftar Kompetensi Pegawai 2. Dokumen perpanjangan masa berlaku sertifikat kompetensi https://drive.google.com/drive/folders/1Ph8fpUJu2yEOxLxAXJ5KaFYmIkuoEGPx?usp=drive_link
				iv. Penetapan Kinerja Individu	2.00					
				a.		Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi			seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)	Matriks Peran dan Hasil, IKU https://drive.google.com/drive/folders/1Yx7TitnEM2KHFSdFzVVTc8ccAr7BtE?usp=drive_link
						a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	A/B/C/D	A		
						a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai	A/B/C/D	A		
						a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan	A/B/C	B		
						a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A		

LAMPIRAN

				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
			b.		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya			seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya serta menggambarkan <i>logic model</i>	Matriks Peran dan Hasil, IKU https://drive.google.com/drive/folders/1nb2dv0TZsv5wvWapQqlZ-KlIeIMfDP-p?usp=drive_link
			c.		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik			Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan	Dokumen Laporan Kinerja Harian dan Sasaran Kinerja Pegawai https://drive.google.com/drive/folders/1MNyBT670TEVaW85hPKYdnYtM_CMCDLA2?usp=drive_link
			d.		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i>			hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i>	1. Nominatif Tukin 2. Rekap Nilai SKP 3. Penghargaan Pegawai 4. Formulir kriteria penghargaan https://drive.google.com/drive/folders/1D4UybLa-hf46zVDX-B8kBKLRby3nags?usp=drive_link
			v.	0.75	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai				
			a.		Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan			KPU Kabupaten Purwakarta telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan KPU RI dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	1. Surat Edaran Sekretaris KPU Kab. Purwakarta Nomor 1 dan 2 Tahun 2025 2. SKB KPU, Bawaslu, dan DKPP 3. SK Sekjen tentang disiplin ASN (PNS & PPPK) 4. SK Hukuman Disiplin KPU Kabupaten Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1jaH7aYonDKWh6rpS_JsmYpgTgWou4kGP?usp=drive_link
			vi.	0.25	Sistem Informasi Kepegawaian				

LAMPIRAN

				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
			a.		a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan	A/B/C	A	data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai	1. Tangkapan layar lembar kerja peremajaan data pegawai oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Purwakarta 2. Dokumen Daftar Urut Kepangkatan 3. Tangkapan layar tampilan MyASN dan SIMPEG https://drive.google.com/drive/folders/1bGZr9CWSMvrCwkAceI_N7_SKOMGWN2mX4?usp=drive_link
			4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00					
			i. Keterlibatan Pimpinan	2.50					
			a.		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perencanaan c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan (hanya menandatangani)	A/B/C	A	Pimpinan di lingkungan KPU Kab. Purwakarta selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan	1. Rapat pencermatan DIPA 2. Dokumentasi Revisi DIPA 3. Notula dan BA Rapat Pleno terkait anggaran 4. Kumpulan KAK https://drive.google.com/drive/folders/1H4tthbi-5d8h5q2pjDon0_D0f6Tk8LjR8?usp=drive_link
			b.		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja b. Jika pimpinan terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perjanjian kinerja c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja	A/B/C	A	Pimpinan di lingkungan KPU Kab. Purwakarta selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja	Notula dan BA Rapat Pleno https://drive.google.com/drive/folders/1EqJOYJPmqWWLBfTbQ4qWJRqi1GkWUXo1?usp=drive_link
			c.		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan b. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan c. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam sebagian pemantauan pencapaian kinerja d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja	A/B/C/D	B	Pimpinan lingkungan KPU Kab. Purwakarta terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan	1. Rapat pencermatan DIPA 2. Dokumentasi Revisi DIPA 3. Notula dan BA Rapat Pleno terkait anggaran 4. Kumpulan KAK https://drive.google.com/drive/folders/1AzeXQO9uOrxesE0ywSXkdY8iMwYGXgp?usp=drive_link
			ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	2.50					
			a.		ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap	Ya/Tidak	Ya	KPU Kab. Purwakarta memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap	Dokumen PERKIN KPU dan Sekretariat KPU : https://drive.google.com/drive/folders/1EnNQI7AzoUhFc3WyHp58ZMMDAofqtuKn?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1PpgHVyH7FXbwEVyedgsY_YxmijX9GiW8?usp=drive_link
			b.		ya, jika perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Ya/Tidak	Ya	Perencanaan kinerja di KPU Kab. Purwakarta telah berorientasi hasil	1. Dokumen capaian output 2. Tangkapan Layar dan dokumen E-MONEV https://drive.google.com/drive/folders/1ezG-JgpyUIdOFIMUGVoi_i4P_ovDiL7P?usp=drive_link

LAMPIRAN

					Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
				c.	Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	ya, jika unit kerja memiliki IKU	Ya/Tidak	Ya	KPU Kab. Purwakarta telah memiliki IKU	Dokumen IKU https://drive.google.com/drive/folders/16uqK4tWtzEGmIaBcGFP4RZIKCXuGwqgn?usp=drive_link
				d.	Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART	a. Jika seluruh indikator kinerja telah SMART b. Jika sebagian besar indikator kinerja telah SMART c. Jika sebagian kecil indikator kinerja telah SMART d. Jika belum ada indikator kinerja yang SMART	A/B/C/D	A	Seluruh indikator kinerja di KPU Kab. Purwakarta telah SMART	Dokumen IKU https://drive.google.com/drive/folders/1r_y0zGHMKFvqwwJ-0xhTyNlwMLRITyWm?usp=drive_link
				e.	Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	Ya/Tidak	Ya	KPU Kab. Purwakarta telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	Laporan LAPKIN https://drive.google.com/drive/folders/1Xj8Lci6JqvzEruC893NmjFru5Z-LpWi?usp=drive_link
				f.	Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja	A/B/C	A	Seluruh pelaporan kinerja KPU Kab. Purwakarta telah memberikan informasi tentang kinerja	Laporan LAPKIN https://drive.google.com/drive/folders/1izqvDr3hnnRQ6zdx1UHontskG6RuFV3c?usp=drive_link
				g.	Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	ya, jika terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	Ya/Tidak	Ya	Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	Tangkapan layar E-LAPKIN https://drive.google.com/drive/folders/1YKw09y_wf7BT7TDEPh-lvjDYfWhscXES?usp=drive_link
				h.	Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	a. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten b. Jika sebagian SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten c. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja belum ada yang kompeten	A/B/C	A	Seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja KPU Kab. Purwakarta kompeten	Dokumentasi dan materi bimtek / rapat tentang SAKIP https://drive.google.com/drive/folders/1s03NKrgLvgrfNoH7SiiQZdSe58U1pmFWb?usp=drive_link
				5. PENGUATAN PENGAWASAN		7.50				
				i. Pengendalian Gratifikasi		1.50				
				a.	Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Jika belum dilakukan public campaign	A/B/C	B	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi di KPU Kabupaten Purwakarta, namun belum secara berkala	1. SK Tim Pengendalian Gratifikasi 2. Dokumentasi public campaign pengendalian gratifikasi yang dilakukan di media sosial, website 3. Pemasangan poster/spanduk pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1XsKyI6wHilKsH_veq1CkgM2vtrV-TMei?usp=drive_link

LAMPIRAN

					Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
				b.		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan			KPU Kabupaten Purwakarta telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian	1. SK Tim Pengendalian Gratifikasi 2. Dokumentasi public campaign pengendalian gratifikasi yang dilakukan di media sosial, website 3. Pemasangan poster/spanduk pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1_XpMGkgVpsdT4JFAGdqaD2_i3BigdbJP?usp=drive_link
				ii.	1.50	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				
				a.		Telah dibangun lingkungan pengendalian			KPU Kabupaten Purwakarta membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi	Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1fj-m598-GOwG2ymbYgJzvp6w24qnBR81?usp=drive_link
				b.		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan			KPU Kabupaten Purwakarta telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi	Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1y12omrBY6t2RSvrmQ-7OYp_Hr-Cb7H6S?usp=drive_link

LAMPIRAN

					Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
			c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko	A/B/C	B	KPU Kabupaten Purwakarta telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi	Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1C07RGSSykgBX5zIFSuUoVcSJe7hiijLN?usp=drive_link
			d.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait	A/B/C	A	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta	Dokumentasi Rapat Pleno Rutin terkait SPIP https://drive.google.com/drive/folders/1Vy0bfy3aliAJyiDyCeGhr4Sp48YPw1Xc?usp=drive_link
			iii.	Pengaduan Masyarakat	1.50					
			a.	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat	A/B/C	B	KPU Kabupaten Purwakarta telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi	1. Tangkapan layar laman website (DUMAS dan WBS) 2. Pengajuan keberatan informasi 3. Pengaduan pencatutan NIK untuk anggota partai https://drive.google.com/drive/folders/1dJVePmtkf3HwEY1u_81yVCkNODqic7LV?usp=drive_link
			b.	Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti		Ya, pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	Ya/Tidak	Ya	KPU Kabupaten Purwakarta telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat	1. PPID 2. Pengaduan pencatutan NIK untuk anggota partai 3. Tangkapan layar register pengaduan 4. SP4N Lapor 5. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat https://drive.google.com/drive/folders/17HfPczB-
			c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	B	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala	1. Laporan PPID 2. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat https://drive.google.com/drive/folders/1P8zO2JH4XhaSlvcCdBLBLCsri3s2blhs?usp=drive_link

LAMPIRAN

				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
			d.		a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti	A/B/C	B	Sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Purwakarta	1. Laporan PPID 2. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat https://drive.google.com/drive/folders/1183rUyCmtbD4Y9OC33Qdnzd0EnPEQy?usp=drive_link
			iv. Whistle-Blowing System	1.50					
			a.		a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan <i>Whistle Blowing System</i>	A/B/C	B	KPU Kabupaten Purwakarta telah menerapkan seluruh kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi	1. Tangkapan layar Website KPU Purwakarta 2. Tangkapan layar Google Form WBS 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 4. SOP WBS KPU Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/19VT3nsGUROMZ0n4YKaPE4C07-GbaUjhy?usp=drive_link
			b.		a. Jika penerapan <i>Whistle Blowing System</i> dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Jika penerapan <i>Whistle Blowing System</i> dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Jika penerapan <i>Whistle Blowing System</i> belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	B	Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> di KPU Kabupaten Purwakarta telah dimonitoring dan evaluasi tidak secara	1. Tangkapan layar Website KPU Purwakarta 2. Tangkapan layar Google Form WBS 3. SK No. 915 Tahun 2025 KPU RI 4. SOP WBS KPU Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1zkWRNO3iC56CEEGL3yorr94hVr5postxK?usp=drive_link
			c.		a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> belum ditindaklanjuti	A/B/C	C	Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> di KPU Kabupaten Purwakarta belum ditindaklanjuti karena belum adanya laporan pengaduan	Spreadsheet hasil Google Form WBS https://drive.google.com/drive/folders/1X23eEJKsHXXQ3rXUxoIpg8L6YS2RRpLV?usp=drive_link
			v. Penanganan Benturan Kepentingan	1.50					
			a.		a. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama b. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama c. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	A/B/C/D	C	Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan di KPU Kabupaten Purwakarta telah dilakukan tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama	1. Dokumen Risk Register 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 3. Pakta Integritas ZI https://drive.google.com/drive/folders/1cXxOWLx8KbI4o85pxsbxOkvyuag_H5MI?usp=drive_link

LAMPIRAN

				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
			b.		a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar layanan c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan	A/B/C/D	C	Penanganan Benturan Kepentingan di KPU Kabupaten Purwakarta telah disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan	1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 2. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu 3. Pakta Integritas ZI https://drive.google.com/drive/folders/10pkJwTgnH556o6PzLN7vTbdElaGolVm?usp=drive_link
			c.		a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil layanan d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh layanan	A/B/C/D	C	Penanganan Benturan Kepentingan di KPU Kab. Purwakarta telah diimplementasikan ke sebagian kecil layanan	1. SK KPU RI No. 323 Tahun 2020 2. Pakta Integritas ZI https://drive.google.com/drive/folders/1xVy_RFc0SKYEIMjPrHOvpidSeMFj7MkK?usp=drive_link
			d.		a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala oleh unit kerja c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja	A/B/C	C	Penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala oleh KPU Kab. Purwakarta	1. SK KPU RI No. 323 Tahun 2020 2. Pakta Integritas ZI https://drive.google.com/drive/folders/19Cuvze8j9OcFzUfC5TAzsYlxLOBqer0?usp=drive_link
			e.		a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja	A/B/C	C	Belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti KPU Kab. Purwakarta	1. SK KPU RI No. 323 Tahun 2020 2. Pakta Integritas ZI https://drive.google.com/drive/folders/1UZ4IAYMB9ldQnAMxP3e3ojXlufvNHUpNb?usp=drive_link
			6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00					
			i. Standar Pelayanan	1.00					

LAMPIRAN

					Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
				a.		Terdapat kebijakan standar pelayanan				
						a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	A/B/C/D/E	A	Standar Pelayanan telah ditetapkan sesuai dengan komponen standar pelayanan publik yang berlaku, serta sesuai dengan dasar hukum pada organisasi KPU	1. PKPU No. 22 Tahun 2023 2. Seluruh SOP yang telah ditetapkan https://drive.google.com/drive/folders/17A0pMX06BOYi8H3OdsGqoW838sqAUZ6w?usp=drive_link
				b.		Standar pelayanan telah dimaklumkan				
						a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan	A/B/C/D	A	Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya dalam Maklumat Pelayanan KPU Kabupaten Purwakarta dan Maklumat Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Purwakarta	Dokumentasi Maklumat pelayanan dan maklumat pelayanan informasi publik https://drive.google.com/drive/folders/1QIMZZjQf_EJsrHWJwT2aO9CAvwxSzugq?usp=drive_link
				c.		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan				
						a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	A/B/C/D	A	Telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 serta disusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).	Hasil survei dan laporan pelayanan publik https://drive.google.com/drive/folders/1GBtNEx56hRyIW772CTPhDCKzfDzAkjm?usp=drive_link

LAMPIRAN

				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
			d.		telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Ya/Tidak	Ya	Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sudah dipublikasi melalui media elektronik yang mudah dijangkau pengguna layanan dalam website, e-PPID, dan SIPPN	1. Tangkapan layar media sosial 2. Tangkapan layar standar pelayanan di website 3. Tangkapan layar standar pelayanan di e-PPID 4. Tangkapan layar SIPPN https://drive.google.com/drive/folders/1zN4zkocpOYLo-a4J6_OrrF4ip8OAulZ6?usp=drive_link
			ii. Budaya Pelayanan Prima	1.00					
			a.		Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	A/B/C/D/E	A	Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan Selain itu, KPU Purwakarta juga telah melaksanakan Knowledge Sharing Peningkatan Pelayanan Informasi Publik melalui Media Publikasi serta Forum Konsultasi Publik yang melibatkan Stakeholder sebagai sarana evaluasi dan perbaikan.	1. Tangkapan layar, jadwal, dan notula Zoom Parmas Insight 2. Publikasi Knowledge Sharing KPU RI 3. Publikasi Knowledge Sharing KPU Kabupaten Purwakarta 4. Dokumentasi dan BA kegiatan FKP https://drive.google.com/drive/folders/1iDGHK_RYoNia9Dt5CIfpEegx8aSRu5Di?usp=drive_link
			b.		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	A/B/C/D	A	Seluruh Informasi tentang pelayanan KPU Kabupaten Purwakarta dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional (SIPPN)	1. Website, E-PPID, JDIH, SIPPN 2. Medsos KPU & JDIH https://drive.google.com/drive/folders/1kCcpZbc93xPR4HGJcSiZVPLvHDqowRR?usp=drive_link

LAMPIRAN

					Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
				c.		Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan secara rutin/berkelanjutan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	A/B/C/D	A	Kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan di KPU Kabupaten Purwakarta secara rutin/berkelanjutan	1. Piagam untuk pegawai 2. SK hukuman disiplin pegawai https://drive.google.com/drive/folders/1IU43kegNPiBZfBcOXBhNZZ8quy0vVdbz?usp=drive_link
				d.		Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	A	KPU Kabupaten Purwakarta telah menyusun dokumen panduan dalam sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan	Regulasi terkait kompensasi pelayanan https://drive.google.com/drive/folders/1pe4oM1meezfOixf4NNc0MOW0D3ShI8Bt?usp=drive_link
				e.		Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu/terintegrasi	A/B/C/D	A	Seluruh pelayanan di KPU Kabupaten Purwakarta sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi yang dihimpun dalam Website Resmi KPU Kabupaten Purwakarta dan laman SIPPN KPU Kabupaten Purwakarta, serta link satu pintu media sosial KPU Kabupaten Purwakarta: - https://kab-purwakarta.kpu.go.id/ - https://sippn.menpan.go.id/instansi/kpu-kabupaten-purwakarta-180530 - https://linktr.ee/MediasosialKPUKab.Purwakarta	1. Website resmi 2. SIPPN KPU Kab. Purwakarta 3. Linktree Media Sosial https://drive.google.com/drive/folders/1wKlHFTyuld6SISBZwy4MP57WouX6AqRF?usp=drive_link

LAMPIRAN

					Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
				f.		Terdapat inovasi pelayanan a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan	A/B/C/D/E	A	KPU Kabupaten Purwakarta telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi	1. Penulisan artikel pegawai 2. Penggunaan CMS untuk pembayaran badan Adhoc 3. Titik Lokasi TPS 4. Surat arahan Sekretaris KPU Kab. Purwakarta penggunaan anggaran badan Adhoc https://drive.google.com/drive/folders/1RmSY76SqP90MELPMc5ZLrpvJJ8ReYYQ4?usp=drive_link
				iii.	1.00	Pengelolaan Pengaduan				
				a.		Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan	A/B/C/D/E	A	KPU Kabupaten Purwakarta media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!	1. Tangkapan layar website resmi KPU Kab. Purwakarta 2. Sarana konsultasi dan pengaduan di Kantor KPU Kab. Purwakarta 3. Sarana konsultasi dan pengaduan online di email, whatsapp dan sosial media https://drive.google.com/drive/folders/1JFj8pDdCX7GNEXOOlg_Q0AxPtWgQG74L?usp=drive_link
				b.		Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja	A/B/C	A	KPU Kabupaten Purwakarta memiliki unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan sesuai bidangnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja	1. Tangkapan Layar Website resmi KPU Kab. Purwakarta 2. SK PPID KPU Kab. Purwakarta 3. SK UPG KPU Kab. Purwakarta 4. SK JDIH KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1y4gUeotDgbluJync0LapMBjtJfEBg2LD?usp=drive_link

LAMPIRAN

				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
			c.		a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	A/B/C	A	Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala di KPU Kabupaten Purwakarta	1. Laporan Layanan PPID KPU Kab. Purwakarta 2. Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat https://drive.google.com/drive/folders/1LVdItGaL5v60rKK1DU3LMG3GOLtTcq?usp=drive_link
			iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1.00					
			a.		a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C/D/E	C	Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun	Tangkapan layar SKM di website resmi KPU Kabupaten Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1Z23rkqrj1RKZh0uFuDs3M61EHI-OpCeN?usp=drive_link
			b.		a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	A/B/C	A	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline	Tangkapan layar SKM di website resmi KPU Kabupaten Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1i-qYNbW6YHM7wXMM19Oxc3pphDIUvzCd?usp=drive_link
			c.		a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	A	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan Tindak Lanjut SKM https://drive.google.com/drive/folders/1nEcPcgDQA2os872bIpnk3CKcjgKAXVMj?usp=drive_link
			v. Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.00					
			a.		a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A/B/C/D	A	KPU Purwakarta telah memiliki pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan	1. Tangkapan Layar website KPU Kab. Purwakarta 2. Tangkapan Layar Media Sosial dan Whatsapp resmi KPU Kab. Purwakarta 3. Google Form izin penelitian dan magang KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1IghoUytQqBICnS4OXvmuNdCyLaxSqOOX?usp=drive_link

LAMPIRAN

				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
			b.		Tela membangun database pelayanan yang terintegrasi		Ya	KPU Kabupaten Purwakarta telah membangun database pelayanan yang terintegrasi melalui penghimpunan akun media sosial yang ditetapkan surat keputusan, himpunan layanan dalam SIPPN, dan media link media sosial KPU Kabupaten Purwakarta	1. SIPPN 2. Linktree kumpulan akun media sosial KPU 3. SK penetapan akun resmi website KPU Kab. Purwakarta 4. SK penetapan akun resmi media sosial JDIIH KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/13KhUW2lrW-o2D-yC_9dMWLfiSxo4vchp?usp=drive_link
			c.		Tela dilakukan perbaikan secara terus menerus		A/B/C	KPU Kabupaten Purwakarta telah melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap teknologi informasi yang dimanfaatkan, khususnya pada website dan e-PPID	Tabel kendali website dan PPID KPU Kabupaten Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1PmTp4xGy9egxhmrplQspu2m4FyCpH4Y4?usp=drive_link
II. REFORM				30.00					
			1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00					
			i. Komitmen dalam perubahan	2.00					
			a.		Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)		%	0.00%	KPU Kabupaten Purwakarta telah memiliki Agen Perubahan.
					Misalkan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan Persentase diperoleh dari Jumlah Perubahan yang dibuat dibagi dengan Jumlah Agen Perubahan				SK Agen Perubahan KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1BVfHpF7-3Wvtk1mw9xNR_XQGs3eDGZ?usp=drive_link
			- Jumlah Agen Perubahan			Jumlah	1		
			- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	0		
			b.		Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen		%	#DIV/0!	
					- Jumlah Perubahan yang dibuat	Jumlah	0		
					- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen	Jumlah	0		
			ii. Komitmen Pimpinan	1.00					
			-		Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan		A/B/C/D/E	B	Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian zona integritas di dokumen perencanaan unit kerja
				1.00					1. BA Rencana Aksi ZI 2. SK Rencana Aksi ZI https://drive.google.com/drive/folders/10DTy0EVeZZ1f8GiMbVOvZ8ITL5EQU1Kt?usp=drive_link
			iii. Membangun Budaya Kerja	1.00					

LAMPIRAN

					Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
				-		Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari				
						a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi	A/B/C/D	A	Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas.	1. SOP Pelaksanaan Apel Pagi 2. SE Sekretaris KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1TX90eEOjJD7oc2Mnc-Ooqj4YfHjMZ1h?usp=drive_link
				2. PENATAAN TATALAKSANA	3.50					
				i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	0.50					
				-		Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan				
						a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan	A/B/C/D	A	Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan	1. Peta Jabatan 2. Dokumentasi Sosialisasi Peta Jabatan https://drive.google.com/drive/folders/117Cc1bpZR0KyBHorj2-xGwnG94Ee7-Ny?usp=drive_link
				ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Mendorong Pelaksanaan Pelayanan Publik yang Lebih Cepat dan Efisien	1.00					
				a		Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien				
						a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	B	Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)	Tangkapan Layar E-SPIP, PPID, JDIH KPU https://drive.google.com/drive/folders/1DgC18OVHcC5KF--UPxXr7DpaU0pUnZa9?usp=drive_link
				b		Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien				
						a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	B	Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)	Tangkapan Layar E-SPIP, PPID, JDIH KPU https://drive.google.com/drive/folders/1h0s93Cx0DnCy5YQgrRZRN71nCGmemrUL?usp=drive_link
				iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2.00					

LAMPIRAN

					Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
				a.		Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan	A/B/C/D/E	B	Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak	Tangkapan Layar SIPOL, SIMPAW, SIREKAP, SIDALIH https://drive.google.com/drive/folders/164GxRL-Y5SsSQ9Gu7ZbucQqsoFUOvnNL?usp=drive_link
				b.		Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan	A/B/C/D/E	D	Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan	Tangkapan Layar SIPOL, SIMPAW, SIREKAP, SIDALIH https://drive.google.com/drive/folders/116PuU-hB9wH-q97aWRVWYGMtr4PTV3zs?usp=drive_link

LAMPIRAN

				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
			c.		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan	A/B/C/D/E	D	Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik	Tangkapan Layar SIPOL, SIMPAW, SIREKAP, SIDALIH https://drive.google.com/drive/folders/1YaXdhUBYpWBUUfiilpc aiVL8b1lCe4p2?usp=drive_link
			3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00					
			i. Kinerja Individu	1.50					
			a		a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (<i>outcome</i>) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (<i>outcome</i>) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (<i>outcome</i>)	A/B/C	A	Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (<i>outcome</i>) sesuai pada levelnya	Tangkapan Layar SKP Pegawai https://drive.google.com/drive/folders/1ITBY_AbM3v1oEpijRzVLfM_VQSJ-ELMj?usp=drive_link
			ii. Assessment Pegawai	1.50					
			a		a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai b. Hasil <i>assessment</i> belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil <i>assessment</i> belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C	B	Hasil <i>assessment</i> belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	Daftar Kompetensi Pegawai di Sekretariat KPU Kab. Purwakarta https://drive.google.com/drive/folders/1RTiIgDAi0371VM5Z2VKt3D-BTPKwE1Qh?usp=drive_link
			iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai	2.00					
			a		Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	%	100.00%	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	https://drive.google.com/drive/folders/1X6FIHjdutvQtysU7IVVkaStyL4NduR?usp=drive_link
			- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya			Jumlah	1		

LAMPIRAN

					Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
				- Jumlah pelanggaran tahun ini			Jumlah	0		
				- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman			Jumlah	1		
			4. PENGUATAN AKUNTABILITAS		5.00					
			i. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja		2.00					
			- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih			Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	%	100.00%	Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1YcSKamoN3SuQXKOWzM0zuJLb32za4c8W?usp=drive_link
			- Jumlah Sasaran Kinerja				Jumlah	1		
			- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih				Jumlah	1		
			ii. Pemberian Reward and Punishment		1.50					
			- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi			a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i>	A/B/C/D	B	Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment	https://drive.google.com/drive/folders/1jiJDIMbVJLrmiZbwwblAODdQUFb6HbO?usp=drive_link
			iii. Kerangka Logis Kinerja		1.50					
			- Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?			a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai d. Kerangka Logis kinerja belum ada	A/B/C/D	A	Terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1jWZCogie4pSd0XP4qR5tpB_h4_v5vtGj?usp=drive_link
			5. PENGUATAN PENGAWASAN		7.50					
			i. Mekanisme Pengendalian		2.50					

LAMPIRAN

					Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
			-	Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang		a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja c. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak tersistem e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi	A/B/C/D/E	A	Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali	Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I Tahun 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1dDqYYNh65j3xfPoGFFmymv6bvAuYeDsR?usp=drive_link
		ii.		Penanganan Pengaduan Masyarakat	3.00		%			
			-	Persentase penanganan pengaduan masyarakat		Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	%	100%		https://drive.google.com/drive/folders/1MHNxzcBHz4ojhvAco7qfZZOzsB9ch?usp=drive_link
			-	Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti			Jumlah	0		
			-	Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses			Jumlah	0		
			-	Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti			Jumlah	0		
		iii.		Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	2.00	Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE Menteri PANRB No. SE/03/M. PAN/01/2005 7. SE Menteri PANRB No. 2 Tahun 2023	%			https://drive.google.com/drive/folders/1LqHL5Pd9CzUcpFnLbaOcinGuxDvzsAx8?usp=drive_link
		a.		Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	1.00					https://drive.google.com/drive/folders/1sfBZG3zXuhRNGAJvMVkTSLbxi6xbXyzk?usp=drive_link
			-	Persentase penyampaian LHKPN			%	100.00%		
			-	Jumlah yang harus melaporkan			Jumlah	5.00		
			-	Kepala satuan kerja			Jumlah	1.00		
			-	Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN			Jumlah	4.00		
			-	Lainnya			Jumlah			
			-	Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	5.00		

LAMPIRAN

				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit
			b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Non LHKPN (1	1.00					https://drive.google.com/drive/folders/1kXM83iU_hPpgY_QRSZ_OVOFnYkLeBeO-u?usp=drive_link
			- Persentase penyampaian Non LHKPN			%	100.00%		
			- Jumlah yang harus melaporkan (tidak wajib LHKPN)			Jumlah	27.00		
			- Pejabat administrator (eselon III)			Jumlah	1.00		
			- Pejabat Penawas (eselon IV)			Jumlah	4.00		
			- Jumlah Fungsional dan Pelaksana			Jumlah	22.00		
			- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	27.00		
			6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00					
			i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2.50					
			a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/ Web 7. Perilaku Pelaksana/ Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi	A/B/C/D	A	Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah)	https://drive.google.com/drive/folders/15quyLLAh7swG-Tkk6fqDAX6lj0wqudxa?usp=drive_link
			b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi		Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar	%	100.00%	Seluruh pelayanan di KPU Kabupaten Purwak	https://drive.google.com/drive/folders/1aa_ElsQkvc4ISxo2yZFD_MUzm8jLZbF4w?usp=drive_link
			- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar			Jumlah	3		
			- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah			Jumlah	3		
			ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	2.50					
			- Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab		a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas	A/B/C/D	B	Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas	https://drive.google.com/drive/folders/1t3xmlkmslpwMK2uqnceobWEeBp5bggKM?usp=drive_link
TOTAL PENGUNGKIT									
B. HASIL				40.00					
			I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22.50					
		a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17.50	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Anti Korupsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	Nilai (0-4)	3.77		https://drive.google.com/drive/folders/1vw8iHdFhRKYWpvg3R2UdZCivlVQ76Gy?usp=drive_link

LAMPIRAN

Bobot				Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	
		b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebel	5.00	a. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional/rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis; b.Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; c.Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; d. Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi masih terdapat target kinerja utama yang tidak tercapai; e. Kinerja utama tidak berorientasi hasil	A/B/C/D/E	C	Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya	https://drive.google.com/drive/folders/1sp0wpmE1fm8TxkKYlJlnFsb_PjVEsUCw?usp=drive_link
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA				17.50					
		-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17.50	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	Nilai (0-4)	3.37		https://drive.google.com/drive/folders/1EhtHAXhQTjNiCeq4BaihCjCpBMD52JuTm?usp=drive_link
TOTAL HASIL									
NILAI HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS									